

BAB IV

Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Kepentingan pemerintah untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pertama terancam gagal akibat tingginya aktivitas *IUU Fishing*, khususnya di Laut Natuna. Laut Natuna merupakan wilayah Indonesia dengan sumber daya ikan tangkap yang cukup tinggi. Sumber daya yang melimpah ini menjadi daya tarik bagi nelayan asing. Banyaknya nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, tidak teregulasi, dan tidak dilaporkan, mengakibatkan menurunnya jumlah tangkapan nelayan Indonesia. Dampak lain juga dapat dilihat dari penurunan kualitas ekosistem laut akibat pemancingan secara berlebihan. Hal ini akan berdampak pada penurunan hasil tangkapan yang akan mengancam pendapatan negara dan juga pendapatan nelayan Indonesia.

Berangkat dari pertanyaan penelitian “Bagaimana upaya *self-help* pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan sumber daya maritim di Laut Natuna dalam menghadapi ancaman *illegal unreported unregulated fishing* yang dilakukan oleh kapal nelayan Indonesia dan kapal nelayan asing pada tahun 2014-2019?”, peneliti telah melakukan akumulasi data berdasarkan kerangka pemikiran *Self-help*. Peneliti memperoleh jawaban bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam menerapkan kebijakan penenggelaman kapal merupakan *self-help*. Hal ini dikarenakan struktur anarki dalam sistem yang memaksa Indonesia untuk

bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Upaya *self-help* yang dilakukan Indonesia adalah dengan memanfaatkan kapabilitas yang dimiliki Indonesia secara internal dan juga eksternal.

Secara internal, pemerintah Indonesia memanfaatkan kekuatan militer yang didukung dengan perumusan kebijakan luar negeri dan kebijakan domestik yang dapat mendukung upaya Indonesia dalam menyelamatkan sumber daya maritim di Laut Natuna. Perumusan kebijakan ini menghasilkan kebijakan penenggelaman kapal dan juga pembentukan Satgas 115 sebagai upaya Indonesia memberantas *IUU Fishing*. Kebijakan ini dijalankan atas koordinasi antar institusi seperti KKP, Kemenko Maritim, Bakamla, Polair, dan juga Kejaksaan dengan tugas dan wewenang masing-masing. Dalam memanfaatkan kapabilitas secara internal, Indonesia juga memanfaatkan masyarakat sebagai lembaga pengawas dengan mendukung pembentukan POKMASWAS khususnya di daerah Natuna.

Secara eksternal, pemerintah Indonesia memanfaatkan pendekatan secara bilateral untuk dapat melakukan kerjasama serta menjaga hubungan baik dengan negaranegara lain khususnya di kawasan untuk menghindari adanya konflik. Pendekatan ini diperlukan untuk meningkatkan dukungan positif terhadap kebijakan Indonesia, khususnya terkait penenggelaman kapal asing yang melanggar wilayah batas ZEE Indonesia. Pendekatan yang dilakukan Indonesia tidak selalu menghasilkan kesepakatan. Kerjasama Indonesia dan Vietnam telah berhasil mengurangi jumlah kapal asing Vietnam yang masuk secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Akan tetapi permasalahan dengan Cina dan Filipina belum dapat diselesaikan meskipun kedua negara melihat *IUU Fishing* sebagai ancaman yang

serius. Oleh karena itu kebijakan penenggelaman kapal sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia atas dirinya sendiri dirasa sebagai kebijakan yang tepat. Melalui kebijakan ini Indonesia dapat mengurangi intensitas kapal asing di wilayah perairan Indonesia. Dengan berkurangnya jumlah kapal asing yang didukung dengan penguatan identitas maritim secara nasional dapat dikatakan bahwa upaya yang dilakukan Indonesia adalah hal yang tepat. Berdasarkan deskripsi yang telah dijabarkan peneliti maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pertanyaan penelitian telah terjawab.

4.2 Saran

Setelah menarik kesimpulan, peneliti menemukan beberapa kelemahan terkait upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia selama periode 2014-2019. Oleh karena itu peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk penelitian di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan KKP bersama dengan instansi pemerintah lainnya merupakan sebuah terobosan baru yang cukup efektif dalam mengurangi kerugian akibat *IUU Fishing*. Akan tetapi *IUU Fishing* merupakan permasalahan yang sulit untuk dikendalikan, oleh karena itu dibutuhkan sebuah rencana jangka panjang sebagai bentuk upaya mengamankan kepentingan Indonesia terkait sumber daya maritim. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga pemerintah Indonesia harus mampu mengawasi segala jenis aktivitas yang terjadi di wilayah perairan Indonesia khususnya di wilayah ZEE dan perbatasan antar negara. Oleh

karena itu pemerintah dapat mengandalkan kerjasama regional dan internasional dalam mendukung kebijakan penanggulangan kapal agar dapat meningkatkan efektivitas kebijakan. Demi mengembalikan kejayaan maritim Indonesia, dibutuhkan usaha dari segenap warga negara Indonesia sekarang dan juga di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bakry, Umar Suryadi. 2017. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jackson .R, Sorensen G. 2007. *Introduction to International Relations*. United

States Oxford University Press Inc.

Dokumen Resmi

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2017. *Rencana Strategis Kementerian*

Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*.

Bab III Esensi Pertahanan Negara. Jakarta. 2015.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2015-2019. *Buku Putih Kementerian*.

Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Rencana Strategis Kementerian*

Luar Negeri Republik Indonesia tahun 2015-2019.

Memorandum Saling Pengertian Antara Badan Keamanan Laut Republik

Indonesia (Bakamla) dan Penjaga Pantai Filipina (PCG).

Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 56 Tahun 2014 Tentang

Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinaan Usaha Perikanan

Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan

Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*).

Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis di Bidang
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 Tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

Per.30/MEN/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2015 Tentang
Peralihan dan Pemanfaatan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela
(*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*).

United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan

United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut) 31 Desember 1985

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Jurnal

Afriansyah, Arie. 2016. "Indonesia's Practice in Combatting Illegal Fishing 2015-
2016." *Asian Yearbook Vol. 22* 283-800.

Anggraini, dkk. 2018. "The Implication of Indonesia's IUU Fishing Policy in
Natuna Territorial Waters towards South China Sea Geopolitics." *Jurnal
Hubungan Internasional Vol. 7 No.2* 118-132.

B .P Resosudarmo, dkk. 2018. "Illegal Fishing War an Environmental Policy During
the Jokowi Era?" *Journal of Southeast Asian Economics Vo. 35 No.
3* 369-385.

- Bashir, dkk. 2019. "The Performance and Strategy of Indonesian's Fisheries: A Descriptive Review." *International Journal of Economics and Financial Issues* 32.
- Bradford, J .F. 2005. "The Growing Prospects For Maritime Security Cooperation in Southeast Asia." *Naval War College Review Vol. 58 No. 3* 63-86.
- Buzan .B, Waever .O. 2003. *Region and Power: The Structure of International Security*. Cambridge.
- Buzan .B, Waever .O, Wilde .J. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. Lynne Rienner Publisher.
- Connelly, Aron L. 2015. "Sovereignty and the Sea: President Joko Widodo's Foreign Policy Challenges." *Contemporary Southeast Asia* 37 no. 1 1-28.
- Cresswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publication.
- Dirhamsyah. 2012. "IUU Fishing in Indonesia's Live Reef Fisheries." *Australian Journal of Maritime and Ocean Affairs* 44-52.
- Ersanti, Putri. 2016. "Upaya Kerjasama Indonesia-Filipina dalam Mengatasi Praktek Illegal Fishing di Perairan Indonesia Periode 2007-2011." *Journal of International Relations, Vol. 2, No. 1* 180-188.
- Fauzan. 2019. "Border Security Problems in the Waters of the Natuna Island: Between National Bounfaries and Illegal Fishing"." *AEGIS Vol. 3, No. 2* 94-114.
- Keliat, Makmur. 2009. "Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 112-117.
- Liddick, .D. 2014. "The Dimensions of a Transnational Crime Problem: The Case of IUU Fishing." *Trends in Organized Crime Issues 4 Vol. 17* 290-312.
- Liliansa, Dita. 2020. "The Necessity of Indonesia's Measures to Sink Vessels for IUU Fishing in the Exclusive Economic Zone." *Asian Journal of International Law* 10 no. 1 125-157.
- Liss, Carolin. 2013. "New Actors and the State: Addressing Maritime Security Threats in Southeast Asia." *Contemporary Southeast Asia* 141-162.

- Nainggolan. 2015. "Kebijakan Poros Maritim Dunia Jokowi dan Implikasi Nasionalnya." *Politica Vol.6, No.2* 167-190.
- Nasution. 2018. "Sinergi Antara Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dan Pembinaan Desa Pesisir (BINDESIR) untuk Membentuk Satuan Armada Nelayan (SATARMANEL) dalam Rangka Mencegah Ancaman Keamanan Maritim." *Jurnal Keamanan Maritim Vol. 4 No. 1* 25-46.
- Poling, dkk. 2017. "Illegal, Unreported and Regulated Fishing as a National Security Threat." *Center for Strategic and International Studies* 1-24.
- Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. 2015. "Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo dan Implikasi Internasionalnya." *Politica, Vol. 6 No. 2* 167-190.
- Resosudarmo, Budi P., Kosadi E. 2018. "Illegal Fishing War: An Environmental Policy During the Jokowi Era?." *Journal of Southeast Asian Economics Vol. 35, No. 3* 369-385.
- Waltz, Kenneth. 1988. "The Origins of War in Neorealist Theory." *The Journal of Interdisciplinary History* 615-628.
- . 1979. *Theory of International Politics*. University of California Berkeley.

Laporan Resmi

- Badan P2K-OI. 2016. *Diplomasi Poros Maritim: Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri*. Kajian, Jakarta: Pusat Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (Pusat P2K-OI).
- CSIS (Centre for Strategic and International Studies). 2016. *Diplomasi Pertahanan Maritim: Strategi, Tantangan, dan Prospek*. Evaluasi, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional.
- Ernawati. 2015. "Implementasi Deklarasi Djuanda dalam Perbatasan Perairan Laut

Indonesia." *Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul . 1-6.

Ismail, Khodijah. 2018. *Perikanan Natuna dan Kesejahteraan Nelayan Pasca Penerapan Kebijakan IUU Fishing*. Laporan Penelitian, Bogor: Yayasan Strategi dan Konservasi.

Mahabrur, dkk. 2018. "Analisis Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Perairan Natuna." *Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan IV*. Tunjungan-Surabaya: Pusat Riset Kelautan BRSDM KP. 263-270.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional.

2016. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Kegiatan Perikanan Laut (IUU Fishing)*. Evaluasi, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Situs Web

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. 2018. "Kementerian Kelautan dan

Perikanan." *kkp.go.id*. Oktober 29. Accessed November 5, 2020.

<https://kkp.go.id/djprl/artikel/7379-kampanye-laut-bebas-sampah-plastik-pada-perhelatan-our-ocean-conference-2018>.

Fajar, Jay. 2014. *Mongabay*. November 22. Accessed Oktober 18, 2020.

<https://www.mongabay.co.id/2014/11/22/pemerintah-mulai-tegas-tangkapkapal-ilegal-fishing/>.

Heriyanto, D. (2016, April 15). *The Jakarta Post*. Retrieved from thejakartapost.com:

<https://www.thejakartapost.com/academia/2016/04/15/qa-illegal-fishing-in-natuna-and-the-south-china-sea-dispute.html>

Hermawan, Maman. 2020. *Kementerian Kelautan dan Perikanan*. Februari 22. Accessed September 5, 2020. <https://kkp.go.id/artikel/17443-perkuat-pemberantasan-iuu-fishing-dan-kejahatan-transnasional-terorganisir-kkptawarkan-3-langkah-solusi>.

- Humas. 2014. *Sekretarian Kabinet Republik Indonesia*. November 13. Accessed September 12, 2020. <https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodopada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-november-2014/>.
- IMO. "Maritime Safety"
<http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/Default.aspx>
- Kemlu. 2019. *Kementerian Luar Negeri RI*. Juli 31. Accessed November 22, 2020. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/497/berita/indonesia-dan-vietnam-dorong-penyelesaian-delimitasi-zee-dan-majukan-kerja-samakamaritiman-dengan-viet-nam>.
- Kominfo. 2016. *Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia*.
 Oktober 18. Accessed Oktober 10, 2020. https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menju-poros-maritimdunia/0/kerja_nyata.
- Pandaya. 2016. *The Jakarta Post*. Agustus 11. Accessed Desember 15, 2020.
<https://www.thejakartapost.com/academia/2016/08/11/finally-a-gamechanger-against-illegal-fishing.html>.
- Pregiwati. 2019. *Kementerian Kelautan dan Perikanan RI*. Oktober 8. Accessed November 10, 2020. <https://kkp.go.id/artikel/14331-dari-natuna-menterisusi-pimpin-penenggelaman-19-kapal-ilegal-di-3-kota>.
- Roza, Rizki. 2019. "IUU Fishing Kapal Vietnam di Perairan Natuna." *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. XI, No. 5*, Maret: 7-12.
- Sekretariat Kabinet RI. 2016. *setkab.go.id*. Juni 6. Accessed November 12, 2020. <https://setkab.go.id/tol-laut-dan-pembangunan-inklusif/>.
- Setkab. 2015. *Sekretariat Kabinet RI*. Oktober 26. Accessed Desember 2, 2020.
<https://setkab.go.id/prihatin-pencurian-ikan-presiden-jokowi-bentuksatgas-pemberantasan-illegal-fishing/>.
- Trixie, Hardiana &. 2014. *setkab.go.id*. Oktober 21. Accessed November 22, 2020. <https://setkab.go.id/menju-indonesia-sebagai-negara-poros-maritim/>.
- Uno, Exellano Ramadhan. 2017. "Upaya Kerjasama Pemerintah Indonesia-Filipina dalam Memberantas Kegiatan IUU Fishing di Perbatasan Kedua Negara Khususnya Laur Sulawesi 2014-2016." *Journal of International Relations, Vol. 3, No. 4* 138-146.
- Wijaya, Marta. 2019. *BBC News Indonesia*. Mei 4. Accessed Desember 10, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48131222>.

Yusfiandayani, dkk. 2016. "Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut." *kkp.go.id*. Juni 6. Accessed November 21, 2020.
<https://kkp.go.id/djprl/artikel/216-mitra-bahari-berkomitmen-percepatpencapaian-poros-maritim-indonesia>.

Artikel

PUSDATIN. 2015. "Pelarangan Trawls dan Seine Nets." *Mina Bahari Edisi 1*,

April-Juni: 36-38.

Sutardi. 2015. "Tidak ada Tempat Bagi Perampok Ikan." *Mina Bahar Edisi 1*,

April-Juni: 11-14.

Sutardi, D. 2015. "Tidak ada Tempat Bagi Perampok Ikan." In *Mina Bahari*, 11-

14. Jakarta: PUSDATIN.

Wahyudi. 2015. "Illegal Fishing untuk Menjadi Poros Maritim Dunia." *Mina*

Bahari Edisi 1, April-Juni: 58-60.

Yusuf. 2015. "Pemberantasan Illegal Fishing: Kepentingan Nasional Dibalik

Hegemoni Nasional." *Mina Bahari Edisi 1*, April-Juni: 28-31.